

GEOSTRATEGI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Kompetensi

*M*ahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis konsep Geostrategi Indonesia yang berupa konsep Ketahanan Nasional Indonesia.

Indikator

Dengan memahami dan menganalisis Ketahanan Nasional Indonesia mahasiswa diharapkan dapat:

- Menjelaskan pengertian Ketahanan Nasional
- Menggambarkan keterkaitan berbagai aspek Ketahanan Nasional
- Menggunakan konsep Ketahanan Nasional dalam memecahkan persoalan atau mencari solusi persoalan yang muncul dalam masyarakat
- Menyadari bahwa Ketahanan Nasional sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Menganalisis isu-isu aktual berdasar perspektif Ketahanan Nasional

Daftar Istilah Kunci

- a. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan didalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
- b. Geostrategi Indonesia adalah merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masadepan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Oleh karena itu geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
- c. Sistem Kehidupan Nasional adalah himpunan berbagai kelembagaan hidup bangsa sebagai subsistem (ipoleksosbudhankam) sebagai subsistem yang dilengkapi dengan norma, nilai dan aturan-aturan.
- d. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional

B. KONSEP ASTRA GATRA

Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa baik pada masa lampau, kini, manapun mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang

hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya dan Hankam.

Pembukaan UUD 1945 memberikan amanat kepada para penyelenggara negara agar dalam hidup berbangsa dan negara dalam lingkup nasional diarahkan untuk mewujudkan upaya melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arah tentang kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional tersebut diatas.

Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Konsepsi "Ketahanan Nasional".

1. Pengertian Geostrategi

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional, geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik.

2. Pengertian Geostrategi Indonesia

Merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih

baik, aman dan sejahtera. Oleh karena itu Geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

PERKEMBANGAN KONSEP GEOSTRATEGI INDONESIA

Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh Komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indocina.

Pada tahun 1965 lembaga ketahanan nasional mengembangkan konsep Geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut: bahwa Geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkalkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Dalam gagasan agak lebih progresif tapi tetap terlihat konsep Geostrategi Indonesia baru sekedar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan penangkal bahaya.

Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era itu konsepsi Geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menajaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga dan tujuan nasional dapat tercapai.

Terhitung mulai Tahun 1974 Geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi,

metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Pengembangan konsep Geostrategi Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara-negara yang lain, bertujuan untuk:

- Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya dan hankam mupun aspek-aspek alamiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
- Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam:
 1. Menegakkan hukum dan ketertiban (Law and Order)
 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (Welfare and Prosperity)
 3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (Defense and Prosperity)
 4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (Yuridical Justice and Social Justice)
 5. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (Freedom of the People)

Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan Geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok:

- Bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkal geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan Negara Indonesia.
- Bersifat developmental/pengembangan yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

a. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini

tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial, sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan Nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial serta memiliki hubungan erat antara gatra didalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salahsatu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain, yang dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan.

Sifat-Sifat Ketahanan Nasional

Untuk mewujudkan ketahanan nasional, dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional. Sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, metode pendekatan dan pengkajian ketahanan nasional terdiri dari pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut:

- Manunggal
- Mawas ke dalam
- Kewibawaan
- Berubah Menurut Waktu
- Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan
- Percaya pada diri sendiri
- Tidak tergantung pada pihak lain

b. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional

- Model Asta Gatra
Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung diatas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh Lemhanas ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan

nasional yaitu:

1. Aspek Tri gatra kehidupan alamiah:
 - Gatra letak dan kedudukan geografi
 - Gatra keadaan dan kekayaan alam
 - Gatra keadaan dan kemampuan penduduk
2. Aspek Panca gatra kehidupan sosial:
 - Gatra ideologi
 - Gatra politik
 - Gatra Ekonomi
 - Gatra Sosial budaya
 - Gatra Pertahanan keamanan

C. INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA

Dalam dunia modern era globalisasi hubungan antar bangsa sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia, tidak ada suatu bangsa yang dapat membebaskan diri dari keterlibatan dengan bangsa dan negara lain. Karena semua bangsa merupakan warga dunia. Hubungan internasional terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu:

- Hubungan invidual, misalnya turis, mahasiswa, pegawai dll.
- Hubungan antar kelompok, misalnya lembaga-lembaga social, keagaan, perdagangan dll.
- Hubungan antar negara, yaitu segala macam hubungan internasional yang dilaksanakan oleh aparaturnegara atas nama negaranya masing-masing.

Hubungan yang beranekaragam antar pribadi, kelompok dan negara itu menciptakan hubungan yang menyerap seluruh kegiatan manusia diseluruh dunia, sehingga terciptalah masyarakat internasional. Hubungan internasional dilaksanakan dengan prinsip persamaan derajat, yang didasari pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara.

Setiap bangsa atau negara yang merdeka dan berdaulat melaksanakan politik luar negeri daam pergaulan dengan berbagai bangsa dan negara lain. Politik luar negeri suatu negara pada pokoknya mengandung dua unsur, yaitu:

- Unsur tujuan nasional yang disertai strategi dan taktik pencapaiannya.
- Unsur tujuan internasional yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional bangsa-bangsa yang bersangkutan.

Bagi Indonesia kedua unsur tersebut terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan ideal normatif. Kebijakan politik luar negeri menyangkut perumusan sikap, arah tindakan dan tujuan yang hendak dicapai suatu negara dalam pergaulan internasional. Kebijakan politik luar negeri tidak sekedar penerapan keluar yang berdiri sendiri, melainkan terkait pada kebijakan nasional yang dirumuskan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kondisi menyeluruh di dalam negeri. Oleh sebab itu seringkali dikatakan bahwa kebijakan politik luar negeri suatu negara adalah pantulan atau perpanjangan dari kondisi nyata di dalam negeri bangsa yang bersangkutan.

Kebijakan politik luar negeri berkaitan dengan tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu:

- **Kepentingan nasional**, sebagai ukurannya adalah keselamatan dan keamanan nasional serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.
- **Kemampuan nasional**, yaitu persepsi bangsa yang bersangkutan tentang kemampuannya sendiri yang berupa sumber daya, baik manusia atau alam serta posisi geografi yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.
- **Dinamika dan kondisi internasional**. Dinamika internasional tidak senantiasa menampilkan situasi yang sesuai dengan keinginan suatu negara, begitu juga situasi internasional tidak bersifat tetap (statis) melainkan mengalami perubahan dan perkembangan,

sehingga suatu negara harus menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi dan situasi internasional itu sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara yang bersangkutan.

Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat

Konsepsi perdamaian sebagai suatu hak asasi manusia jelas akan membantu meningkatkan kesadaran umum bahwa setiap orang mempunyai peran dalam memelihara perdamaian, memperluas dukungan umum terhadap kebijaksanaan perlucutan senjata. Perdamaian merupakan nilai tertinggi bagi umat manusia dan satu-satunya yang diagungkan oleh hukum internasional. Dengan demikian menjabarkan gagasan hak asasi manusia atas perdamaian dapat diberi prioritas yang tinggi.

Larangan umum terhadap penggunaan kekuatan bersenjata dimaksudkan sebagai tonggak bagi kebijakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Deklarasi dan berbagai kaidah hukum internasional mengenai hubungan dan kerja sama persahabatan antar bangsa dalam kaitannya dengan resolusi Sidang Umum PBB tanggal 24 Oktober 1970, di antara isinya menyatakan bahwa “ setiap perang agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan bahwa suatu ancaman atau penggunaan kekuatan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Usaha untuk menciptakan perdamaian dunia telah banyak menjadi pemikiran para ahli politik dan kenegaraan sejak zaman dahulu, seiring dengan sejarah umat manusia yang dalam bentuk suatu negara menundukkan negara lain, negara yang besar menguasai negara yang kecil, negara yang maju menjajah negara yang belum maju. Keinginan damai sebagai akibat dari kerugian umat manusia yang telah melakukan peperangan untuk merebut suatu kekuasaan dan kekayaan, namun pada hakekatnya negara yang kuat dan menang dalam suatu peperangan tidaklah kekal. Suatu saat dia akan menerima akibatnya

berupa kekalahan, seperti Jerman dan Jepang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar setelah Perang Dunia I, kemudian kekalahan telah pada Perang Dunia II. Pada akhirnya dua negara itu tentu akan menyadari tidak ada gunanya menindas hak-hak bangsa lain yang berakibat runtuhnya martabat manusia. Dalam waktu yang tidak begitu lama kedua negara (Jerman dan Jepang) itu dapat bangkit sebagai suatu bangsa yang terhormat dan besar karena telah meninggalkan cara-cara yang dapat menimbulkan perang atau sengketa antar negara.

Setiap negara di dunia baik negara maju atau negara berkembang menginginkan adanya suatu dunia yang tertib dan damai. Tidak ada suatu negara pun di dunia yang menginginkan perpecahan. Namun demikian kenapa terjadi peperangan dan kersengketaan antara negara yang satu dengan negara yang lain? Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki kepentingan, keinginan serta kemauan yang berbeda-beda, yang dilandasi oleh suatu sistem atau cara memperjuangkan kepentingan tersebut dengan cara yang berbeda-beda pula, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan antar negara.

Suatu tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara yang dianggapnya tidak akan mempengaruhi ketertiban dunia, bahkan dinyatakan sebagai tujuan damai, tetapi oleh negara lain dianggap sebagai suatu gerakan yang menjurus kepada bahaya terhadap ketertiban dunia. Contohnya Agresi Amerika Serikat kepada Irak yang berakibat kehancuran martabat umat manusia di awal abad ke 21 ini.

Penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional sudah di larang dan oleh sebab itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Majelis Umum PBB telah menerima deklarasi untuk meminta semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain.

Berdasarkan Deklarasi Manila 1982 mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai, menyatakan sebagai berikut:

- Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.
- Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
- Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
- Prinsip persamaan kedaulatan negara.
- Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
- Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.
- Prinsip keadilan dan hukum internasional.

Masalah Internasional

Setelah berakhirnya perang dingin, hubungan antara negara belum memberikan jaminan ke arah perdamaian dunia. Walaupun telah terjadi saling rujuk antara negara-negara besar. Dunia masih jauh dari suasana damai dan aman. Selama perdamaian dunia masih terancam, kemerdekaan bangsa-bangsa terkekang, aspirasi rakyat terhambat dan ketidakadilan ekonomi terus berlanjut. Ketenangan dunia akan tetap terganggu. Negara-negara berkembang dihadapkan pada tantangan-tantangan bersejarah yang diakibatkan oleh kenyataan-kenyataan baru dalam bidang politik dan ekonomi.

1. Dalam Bidang Politik

Salah satu akibat sampingan yang sungguh memperihatinkan dari saling pendekatan antara-antara negara-negara besar adalah gejala disintegrasi dan pecahnya negara-negara di berbagai bagian dunia. Pecahnya perang saudara yang disulut oleh pertentangan etnis dan agama sedang melanda negara-negara, khususnya negara dunia ketiga.

Suatu yang sangat memperhatikan ialah kita menyaksikan rangkaian peristiwa yang menimpa negara-negara dunia ketiga bekas Republik Federasi Sosialis Yugoslavia. Sebelum di landa krisis, negara itu senantiasa memainkan peranan yang dinamis dalam percaturan politik internasional. Kini, negara itu telah pecah dengan berdirinya negara-negara baru yang merdeka secara terpisah, bahkan beberapa warga/pemimpinnya telah dianggap melakukan kejahatan kemanusiaan. Di Somalia, tragedi kemanusiaan telah menimpa ditengah-tengah berkobarnya perang saudara. Sekalipun PBB telah turun tangan, suatu hal yang menjadi pertanyaan bagaimana usaha melalui perundingan yang mengarah pada rujuk dan rekonstruksi nasional.

Tragedi kemanusiaan yang paling dahsyat telah menimpa rakyat Irak di awal abad ini akibat Agresi Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Berjuta-juta manusia yang tidak berdosa telah kehilangan nyawa. Agresi Amerika Serikat dengan sekutunya yang tidak direstui oleh PBB itu telah mendudukan dunia kepada posisi yang tidak seimbang dan sederajat dalam stratifikasi negara atas negara yang kuat dan besar berhadapan dengan negara kecil dan lemah. Inilah suatu tantangan perdamaian dunia bahwa dalam kenyataan negara-negara itu tidak dalam posisi persamaan derajat. Amerika Serikat dengan leluasa mencampuri kedaulatan negara-negara yang tidak sejalan dengannya, sebagaimana juga terjadi di Afganistan dan belahan dunia lainnya. Dengan dalih memerangi teoris kedaulatan suatu negara menjadi tidak ada harganya.

Di Timur Tengah, perjuangan rakyat Palestina yang sudah menjadi isu kemanusiaan dan keadilan sejagat juga belum menunjukkan jaminan perdamaian dunia di kawasan Timur Tengah. Walaupun Palestina telah mendapat otonomi, isu Baitulmaqdis masih menjadi kunci kestabilan di kawasan ini. Kematian Presiden Yasir Arafat pada akhir tahun 2004 semakin menunjukkan belum ada tanda-tanda perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Runtuhnya bipolar di dunia secara cepat akan membawa pada suatu konstelasi keamanan global semain belum menampakkan hasil yang mengembirakan tentang perdamaian dunia. Pemiayaan militer global yang tidak terkendali jelas merupakan ancaman yang gawat terhadap perdamaian dunia. Di samping pemborosan terhadap ekonomi nasional dan internasional. Betapa mudahnya Amerika Serikat mengeluarkan biaya perang yang bergitu besar beserta sekutunya, sementara dibelahan dunia ketiga banyak rakyat yang miskin dan kekurangan gizi serta membutuhkan modal pembangunan ekonomi mereka. Inilah suatu permasalahan yang memprihatinkan banyak negara-negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar.

2. Bidang Ekonomi

Pembicaraan ekonomi dunia menunjukkan bahwa tantangan-tantangan lama belum teratasi, sementara permasalahan baru bermunculan. Masalah kemiskinan, keterbelakangan, kemandegkan atau pertumbuhan negatif masih menimpa sebagian besara negara-negara berkembang. Sementara itu, lingkungan global tidak mendukung. Banyak diantara negara berkembang, khususnya negara-negara yang paling terbelakang, keadaan ekonominya telah mencapai titik krisis yang berkepanjangan di Afrika. Di benua ini penderitaan ekonomi sosial dari berjuta-juta rakyatnya memerlukan bantuan secara cepat dan terpadu.

Globalisasi perekonomian internasional yang semakin meningkat serta kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah secara drastis pola-pola produksi, perdagangan, dan keuangan. Secara potensial, hal itu dapat membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan bersama. Namun, hal-hal tersebut telah berdampak negatif terhadap negara berkembang. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem perekonomian di Eropa Tengah dan Timur serta kelompok-kelompok ekonomi antara negara-negara maju mungkin mempunyai aspek-aspek positif. Namun, kini disadari bahwa perkembangan ini

ternyata mengahihkan pusat perhatian dan dorongan dalam upaya mengatasi kemiskinan dinegara-negara berkembang serta berdampak negatif terhadap prospek perdagangan.

Putaran uruguay mengenai perdagangan dunia masih menghadapi kemacetan. Jika putaran ini selalu menghadapi kegagalan untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang seimbang, tentu berakibat semakin meningkatnya proteksionisme.

Krisis utang luar negeri negara-negara berkembang kini bertambah meluas. Keadaan ini diperburuk lagi oleh fluktuasi nilai tukar mata-mata uang utama serta tingkat bunga. Akibatnya, juga kepada negara-negara yang bersungguh-sungguh membayar utangnya belum dapat tertolong dalam penyelesaiannya dengan negara-negara maju, sementara arus dana internasional bagi pembangunan makin berkurang dan harga komoditi utama negara-negara berkembang terus menerus mengalami kemerosotan dan kemelut yang berkepanjangan.

Pemecahan persoalan internasional dalam bidang ekonomi pada akhirnya dikembalikan kepada masalah-masalah kemandirian nasional, keserasian antara pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional dari negara masing-masing, khususnya kepada negara miskin dan berkembang. Usaha menggalang negara-negara berkembang atau negara Selatan-Selatan atas dasar kemandirian bersama patut ditingkatkan.

3. Bidang Sosial Budaya

Akibat kemajuan teknologi informasi, hubungan anatara belahan dunia ini semakin dekat dan terbuka. Tidak ada sesuatu yang dapat dirahasiakan dalam hubungan antara manusia dan manusia lain diberbagai dunia, khususnya dengan teknologi internet. Suatu negara dengan negara lain saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap kehidupan sosial budaya. Pengaruh negara-negara maju lebih memiliki kekuatan karena masih banyaknya kalangan generasi muda di negara berkembang menerima tanpa selektif



terhadap budaya yang datang dari negara maju sehingga secara berangsur-angsur mengaburkan identitas budaya suatu negara.

Tata nilai budaya yang begitu lama dipertahankan dalam budaya negara-negara timur, secara berangsur-angsur telah digantikan dengan budaya barat. Cara berpakaian, makanan, dan minuman dikalangan tertentu masyarakat timur telah menyerupai cara-cara negara Barat, termasuk juga kesenian. Gejala masuknya minum-minuman keras dan obat-obat terlarang telah banyak meracuni remaja di negara-negara berkembang, yang pada gilirannya nanti akan mengkhawatirkan sumber daya manusia untuk membangun negara agar sejajar dengan negara maju.

Usaha-usaha dari negara-negara berkembang untuk memelihara dan mengembangkan serta memperkenalkan budayanya keseluruh pelosok dunia sedang digalakkan oleh pemerintah dalam rangka menarik industri pariwisata. Namun, suatu hal yang menjadi pertanyaan, apakah nilai-nilai luhur dari budaya negara itu masih diamalkan oleh masyarakat. Hal ini akan menjadi suatu tantangan dalam melestarikan budaya tersebut apabila masyarakatnya kurang memelihara nilai-nilai luhur budayanya.

LATIHAN

1. Jelaskan seberapa pentingkah kajian tentang Ketahanan Nasional bagi suatu bangsa khususnya bangsa Indonesia.
2. Sebutkan sifat-sifat Ketahanan Nasional beserta pengertiannya.
3. Jelaskan konsepsi dasar Ketahanan nasional menurut model Morgenthau dan bandingkan dengan model menurut Lemhanas.
4. Apakah Anda setuju dengan pendapat Cline tentang ketahanan nasional suatu bangsa? Mengapa!
5. Jelaskan sikap dan pendapat Anda tentang *illegal logging* di Indonesia. Sebutkan beberapa prinsip yang melandasi hidup berdampingan secara damai dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dan Deklarasi Manila?

6. Faktor apakah yang menyebabkan sulitnya mewujudkan perdamaian dunia dalam sejarah?
7. Apakah posisi AS saat ini mampu menciptakan dunia semakin damai dalam hubungan internasional? Jelaskan!
8. Apakah ketimpangan perekonomian dunia dapat menciptakan hidup berdampingan secara damai? Jelaskan pendapat anda!
9. Apakah pengaruh sosial budaya negara-negara maju kepada negara berkembang dapat menjaga hidup berdampingan secara damai dan persamaan derajat? Jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

Ichlasul Amal, Armaidly Armawi (ed), 1996; *Sumbangan ilmu Sosial Terhadap Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, (ed), 1997; *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, (ed), 1998; *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Lemhanas, 1996, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Diterbitkan Dengan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud dan Gramedia, Jakarta.

_____, 2004, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia, Jakarta

Sunardi, RM, 2004, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, PT. Kuarternita Adidarma, Jakarta.

Nasution, A H, 1977, *Sishankamrata/ Ketahanan Nasional*, Jakarta, Mimeo, Jakarta.

Santoso, Budi, SS, 2002; *Peranan Para Pemimpin dan Patriot Bangsa Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara*; Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.

udinigrat, Gunawan, 2001 ; *Pembangunan Ekonomi dan Integrasi Bangsa*; Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps – UGM , Yogyakarta.

ryohadiprojo, Sayidiman, 2001, ; *Integrasi Bangsa*”, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional S.Ps-UGM, Yogyakarta.





TENTANG PENULIS

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



Drs. Syahril Syarbaini, Ph.D., lahir di Bukittinggi, 20 November 1956. Menempuh pendidikan: BA, Jurusan Civics/Hukum, IKIP Padang (1979), S1 (Drs), Jurusan Civics/Hukum, IKIP Bandung (1982). (MA) Political History, Institute of Post-graduate Studies and Research, University of Malaya (1996), Ph.D. Political Science, di University Kebangsaan Malaysia (2005), Kurus Dosen

Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 1 tahun 2005 berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (Lektor Kepala) di Universitas Indonesia Esa Unggul dan beberapa universitas di wilayah DKI Jakarta serta mengajar SMAN 23 Jakarta. Tim Penelaah Soal Pusjian Balitbang Depdiknas, Ketua Musyawarah Guru Tata Negara Kanwil Depdikbud DKI Jakarta 1989-1993. Penatar P4 di BP 7 DKI Jakarta 1987 - 1993, Pegawai Home Staff Non-Diplomatik di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur (1993 - 1998). Karya tulis yang telah diterbitkan adalah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. 2001, Sosiologi dan Politik (2002). Ghalia Indonesia.

Universitas
Esa Unggul



Drs. Alharas Wahid, MM, lahir di lahat 16 November 1956. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional tahun 1994 pada jurusan Ilmu Politik, serta S2 Magister Manajemen jurusan Manajemen Pemasaran di Universitas INDONUSA Esa Unggul tahun 1998.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen dan menjadi Koordinator Mata Kuliah Umum di Universitas INDONUSA Esa Unggul di mana mata kuliah Kewarganegaraan merupakan bagian dari tanggungjawabnya.



Drs. H.A. Djasli, lahir di Gr. Panjang, Padang Sumatera Barat, 24 Juni 1939. Pengalaman bekerja dimulai dari menjadi guru SD pada tahun 1961 sampai 1963. menanjak menjadi guru SMP, SMA hingga mendapat mutasi dari PEMDA dan pensiun pada tahun 1995.

Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Universitas Satya Gama Jakarta dan sebagai dosen tidak tetap pada dua Universitas yaitu Universitas Mercu Buana dan Universitas INDONUSA Esa Unggul.



Sugeng Wibowo, Drs, M.Si, lahir di Bumiayu (Jawa Tengah) pada tanggal 17 Mei 1958 adalah dosen dengan jenjang kepangkatan akademis Lektor luar biasa di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta antara lain di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Bina Nusantara (UBINUS), Universitas Indonusa Esa Unggul (UIEU) dan Akademi Farmasi Hang Tuah,

kesemuanya di Jakarta. Sedangkan pekerjaan utamanya adalah sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) provinsi DKI Jakarta dengan golongan/ruang gaji (IV/A).

Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya (SD, SMP, SMA) di Bumiayu, kota kelahirannya, kemudian menyelesaikan sarjannya (Drs) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) program studi pendidikan Kewarganegaraan (1983) dan Pascasarjana (M.Si) di Universitas Satyagama program studi Ilmu Pemerintahan (1999). Kursus yang pernah diikuti adalah kursus dosen Kewiraan lemhanas (1992), Kursus peningkatan dosen Kewiraan Lemhanas (1994). Disamping itu pernah mengikuti kursus calon dosen Pancasila, Dikti Depdiknas (1994), kursus TOT dosen pancasila, Dikti Depdiknas (1996).

Ia pernah aktif di BP7 DKI Jakarta (1986 - 1997) sebagai penatar P4 bidang tatar Haluan Negara, dan wawasan kerja aparatur Negara. Kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Lokal, sebuah lembaga penelitian, pendidikan dan kajian masalah-masalah politik lokal dan pembangunan daerah.

TENTANG EDITOR



Dhoni Yusra, lahir di Bandung 27 Juli 1976, menamatkan pendidikan S1 di Universitas Padjajaran Bandung Fakultas Hukum dengan spesialis di bidang hukum ekonomi. Penulis pernah bekerja sebagai asisten pengacara pada LBH Bandung pada tahun 1998-1999, sebagai Public Relation Junior Officer pada PT. Pos Indonesia pada tahun 1998, sekarang bekerja di Pengembangan Sumber Daya Manusia (Biro Hukum) Universitas INDONUSA Esa Unggul.

TENTANG KONTRIBUTOR

Dr. Ir. Muhril Ardiansyah, M.Sc., Doktor lulusan dari *Oklahoma State University* (OSU, Oklahoma, USA) di bidang ekonomi pertanian. M.Sc, lulusan dari *Oklahoma State University* (OSU, Oklahoma, USA) bidang ekonomi pertanian, dan Ir. Lulusan dari Institut Pertanian Bogor (IPB Bogor Indonesia) bidang *agronomy* pertanian. Sebagai *part time consultant/researcher* pada INDEF (*Institute for Development of Economic and Finance*), STRATEDY Consulting, dan SCORE Consulting, serta di GLOBAL Education, Training and Consulting. Juga sebagai *part time lecturer program S1 dan S2* di beberapa universitas di Jakarta (antara lain Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas INDONUSA Esa Unggul (UIEU), STIE Gandhi School). Pernah menjadi consultant IDB (Islamic Development Bank) dan Bappenas, serta pernah menjabat sebagai pembantu direktur akademik program paska sarjana UIEU. Sekarang ini menjabat sebagai Kepala PAMU (Pelaksana Akademik Mata Kuliah Universitas) Universitas INDONUSA Esa Unggul.

-oo0oo-